

seperti pertukaran data dari KPP Lain atau instansi lain. Dari perluasan data dan pemanfaatan data diharapkan dapat digali potensinya dan dapat menambah penerimaan ke depannya.

3. Perlunya penambahan pegawai baik petugas maupun AR dalam rangka pemberian pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak sehingga beban kerja dan wajib pajak yang mereka layani atau awasi semakin sedikit. Dengan peneurunan beban kerja dan jumlah WP yang diawasi diharapkan mereka dapat optimal dalam memberi pelayanan dan pengawasan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asikin, Agustini, Tika Noorjaya, dan Yullia Himawati (editor), *Pajak, Citra dan Upaya Pembaruannya: Pokok-Pokok Pemikiran Salamun A.T.*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1991.
- Creswell, John W., *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, California: Sage Publications, Inc., 1994.
- Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln, *The Landscape of Qualitative Research*, London: Sage Publications, 2003.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta: Prenada Medio Group, 2006.
- Ditjen Pajak akan terbitkan *sunset policy*. *Bisnis Indonesia*, 25 Agustus 2008
- Dunn, N. William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Samodra Wibawa dkk, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000.
- Dye, Thomas R., *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1981.
- Edwards III, George C. and I. Sharkansky, *The Policy Predicament*, San Francisco: Freeman and Co., 1980.

- Faisal, Sanafiah, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Fajar, Abdullah, Metodologi Penelitian Kualitatif, *Jurnal Penelitian Agama*, Nomor: 1 Juni – Agustus 1992. Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga.
- Gunadi, "Rasionalitas Reformasi Administrasi Perpajakan" disarikan dari Naskah pidato pengukuhan sebagai guru besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tanggal 13 Maret 2004 berjudul *Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance*, URL:<http://www.infopajak.com/berita/170504bil.htm>, sumber: Bisnis Indonesia tanggal 17 Mei 2004.
- Gunadi, Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*), *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Volume 4 Nomor 5, Februari 2005.
- Hidayat, *Amandemen dan Amnesti Pajak*, OMBUDSMAN, Edisi No.71 Th VI Okt-Nov 2005, hal. 15-17.
- Jones, Charles O., *An Introduction To The Study Of Public Policy*, California: Brooks/Cole Publishing Company Monterey, 1994.
- Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 3, No. 2, November 2001: 142 – 156, *Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra* 00
- King, John R., "The Concept of Income" dalam *tax policy handbook*.
- Mansyuri, R., *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ind Hill-Co, 1996.
- Meter, Van and Van Horn, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, Amsterdam: Van Meter and Van Horn Administration & Society, 1975.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, London: Sage Publications, 1994.
- Moloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosdakarya, 2001.
- Nasucha, Chaizi, *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Nasution, Bismar, "Reposisi Keuangan Negara dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia: Telaah Kritis RUU Perpajakan", Disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum dan Pemerintahan Yang Baik (*Center for Law and Good Governance Studies*) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Medan, tanggal 8 Desember 2005.
- Nasution, Darmin, www.kapanlagi.com, 2007.
- Neuman, W. L., *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*, London: Allyn and Bacon, 1997.
- Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

- Patton, Michael Quinn, *Qualitative Evaluation and Research Methods*, New Delhi: Sage Publications, 1990.
- Perry, Guillermo dan John Walley, dikutip dari skripsi Marcus Taufan Sofyan dalam Pengaruh Penerapan Sistem administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pada KPP Wajib pajak Besar
- Rollinson, Derek, David Edwards, and Aysen Broadfield, *Organisational Behavior and Analysis*, Essex: Pearson Edu. Limited, 1998.
- Rosdiana, Haula dalam Tesisnya Pajak Penghasilan Orang Pribadi Khususnya WAJIB PAJAK Dalam Negeri dengan Fokus Penyempurnaan Beban Pajak Dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak mengutip pendapat John R. King "The Concept of Income" dalam *Tax Policy Handbook*.
- Rosen, Harvey S., *Public Finance*, Tokyo: Tppan company ltd, 1989.
- Salamun, A.T., *Pajak, Citra, dan Upaya Pembaruannya*, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1991.
- Santoso, Priyo Budi, *Birokrasi Pemerintah Orde Baru*, Jakarta: Grafindo Persada, 1988.
- Santoso, Purwo dalam Catatan Kuliah Kebijakan Publik, tanggal 19 Februari 2008.
- Schermerhorn, John R., Jr., James G. Hunt and Richard N. Osborn, *Organizational Behavior*, Danvers: John Wiley & Sons., Inc., 2005.
- Scott, Richard W. and Gerald F. Davis, *Organizations and Organizing*, New Jersey: Pearson Education, 2007.
- Silitonga, Erwin, "Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak dan Referendum", makalah disampaikan pada dies natalies fakultas ekonomi Universitas Parahyangan ke -31, Bandung 11 Februari 2006
- Simons, Henry C., *Personal Income Taxation: The Definition of Income as a Problem of Fiscal Policy*, Chicago: University of Chicago Pres, 1980.
- Singh, V., *Tax Thoughts on Today's Taxing Time*, Selangor: Digibook Sdn. Bhd, 2005.
- Sommerfeld, Ray M., *An Introduction to taxation*, Harcourt brace javanovich Inc, 1982.
- Strauss, A. and J. Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sunarsip, "Mega Fakta atau Mega Ilus ", *Harian Repubika*, 8 September 2004.
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Widodo, Erna dan Mukhtar, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta: Avirouz, 2000.

2. Karya Ilmiah (Disertasi, Tesis, dan Skripsi)

Arini, Ranti Kusuma “Kebijakan Pengampunan Pajak di Indonesia (Suatu Tinjauan atas Kebijakan Pengampunan Pajak tahun 1984 dan Pengampunan Pajak Tahun 2008)”, skripsi Program Studi Ilmu Administrasi, Program Sarjana FISIP Universitas Indonesia, Jakarta 2008.

Mulyono, Budi, “*Sunset Policy* di Indonesia: Beberapa Manfaat dan Kelemahan dalam Implementasinya”, tesis Program Studi Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia, Jakarta 2008.

Perdanawati, Illiyina,” Analisis Implementasi Sunset Policy 2008 (Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Tebet)”, skripsi Program Studi Ilmu Administrasi, Program Sarjana FISIP Universitas Indonesia, Jakarta 2008.

Rahayu, Ning, “Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada *Foreign Direct Investment* yang berbentuk *Subsidiary Company* (PT. PMA) di Indonesia (Suatu Kajian tentang Kebijakan Anti *Tax Avoidance*)”, disertasi Doktor Program Studi Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

3. Artikel Jurnal

Alm, James & Beck, William (1991). Wiping the Slate Clean: Individual Response to State Tax Amnesties, *Southern Economic Journal*, 1043-1053.

Silitonga, Erwin (2006). Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referendum. Disampaikan dalam acara Dies Natalis Fakultas Ekonomi Universitas Prahyanan ke 31, Bandung, 11 Februari 2006

Torgler, Schaltegger, & Schaffnet (2003). Is Forgiveness Divine? A Cross-Culture Comparison of Tax Amnesties, *Schweiz Zeitschrift Fur Volkswirtschaft und Statistik*, Vol 139(3) 375-396

Uchitelle, Elliot (1989). The Effectiveness of Tax Amnesty Programs in Selected Countries. *FRBNY Quarterly Review/Autumn* 49-50

Viswanathan, Manoj (2007). Sunset Provisions in the Tax Code: a Critical Evaluation and Prescriptions for The Future. NYU207

4. Artikel di Website

Burton, Richard (2009, Januari 17), *Perppu Sunset Policy, Apa yang Salah?*. *Bisnis Indonesia*. Diunduh 15 Februari 2009, <http://www.ortax.org/ortax?mod=berita&page=show&id=4903&q=&hlm=7>

OIN. (2009, Januari 30), “*Sunset Policy*” Hasilkan Rp 5.56 Triliun. Diunduh Februari 13, 2008. <http://www.kompas.com/read/xml/2009/01/30/09494650>

Parwito (2005, Agustus 25), *Ditjen Pajak akan Terbitkan Sunset Policy*.
Bisnis Indonesia. Diunduh 26 Februari 2009.
<http://www.infopajak.com/berita/250805bi.htm>

Riyanto, Agus Riyanto dan Gumilar, Tedy Gumilar (2009, Januari 16), *Baru Ramai Menjelang Sunset*. Trust No 12 Tahun VII, 2009. Diunduh Februari 13, 2009.
<http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&d=4907&q=nopwp/p&hlm=4>

4. Dokumen lembaga

Departemen Keuangan Republik Indonesia *Nota Keuangan Pemerintah, Data Pokok APBN-P 2008 dan APBN 2009*.

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

-----, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tanggal 29 April 2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

-----, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007.

-----, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan dengan Pembetulan Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007.

-----, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan Terkait dengan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

-----, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya.

-----, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-67/PJ/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Pemanfaatan Data atau Keterangan yang Berkaitan dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Disampaikan Wajib Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya.

-----, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-439/PJ/2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan *Sunset Policy*.

-----, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

-----, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-11/PJ/2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Penegasan Mengenai Wajib Pajak yang Memperoleh NPWP dalam Bulan Januari dan Februari 2009.

-----, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-12/PMK.03/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Perubahan atas PMK-66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan SPT, dan Persyaratan WP yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A UU No.6 Tahun 1983 Tentang KUP Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007

-----, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-13/PJ/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007.